

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: Sinar Grafika;
- B. Ilyas, Wirawan & Burton, Richard, 2010, *Hukum Pajak*, Cetakan 5, Jakarta: Salemba Empat;
- Darwin, 2013, *Pajak Bumi Dan Bangunan dalam tataran praktis*, Cetakan 2, Jakarta: Mitra Wacana Media;
- Hartoyo, Harry & Untung, Supardi, 2010, *Membedah Pengelolaan Administrasi PBB & BPHTB*, Cetakan 1, Jakarta: Mitra Wacana Media;
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi*, Cetakan 17, Yogyakarta: Cv.Andi;
- Priantara, Diaz, 2012, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan 2, Jakarta: Mitra Wacana Media;
- Pudyatmoko, Y.Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan 4, Yogyakarta: Cv.Andi;
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Cetakan 1, Bandung: Mandar Maju;
- Saidi, Muhammad Djafar, 2010, *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*, Cetakan 2, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada;
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2012, Cetakan 12, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada;
- Suyanto, Heru & Palwono, Agung S, 2011, *Hukum Pajak Dan Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cetakan 1, Jakarta: Heru Suyanto Publishing;
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Cetakan 10, Jakarta: Salemba Empat;

Widjajati, Erna, 2011, *Dasar Hukum Pajak di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta: Roda Inti Media;

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang .No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

-----, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

-----, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, tentang Pajak Bumi Bangunan di sektor Perdesaan Perkotaan.

-----, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 203 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

-----, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

-----, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 129 Tahun 2013 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang PBB-P2 Hasil Pelimpahan dari Pemerintah Pusat.

-----, Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 89 Tahun 2013 tentang Inventarisasi Daftar Piutang PBB-P2 dan Pemasangan Papan Informasi Atau Pemberitahuan Piutang PBB-P2 Bagi Tanah Yang Tidak Diketahui Keberadaan Pemilikinya.

3. SUMBER INTERNET

<http://www.nonstop-online.com/2013/02/pelayanan-sppt-sudah-bisa-di-kantor-kelurahan-dan-kecamatan-penerimaan-pbb-dki-ditarget-rp-36-triliun/> Pelayanan SPPT sudah bias di kantor Kelurahan dan Kecamatan Penerimaan PBB DKI ditargetkan 3,6Triliun, Redaksi on 26/02/13, Apa Kabar DPC, Apa Kabar Pemkot, Dari Balaikota, DPRD, Jakarta Bergerak.

<http://www.pajak.go.id/content/seri-pbb-pengalihan-pbb-menjadi-pajak-daerah>,
Seri PBB - Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah, Minggu, 3 Juni 2012 - 01:27.

<http://kecamatanpasarrebo.com/home/component/content/article/8-pemerintahan/2-kependudukan.html> Published on Monday, 15 October 2012 05:09.

<http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/layanan-diklat/seputar-diklat/1346-proses-pengalihan-pbb-p2>-Wednesday, February 26, 2014
Proses Pengalihan PBB-P2 ,Pusdiklat Pajak.

Booklet, Pajak Bumi Bngunan Perdesaan dan Perkotaan, Seri PBB. hal.7,
<http://www.slideshare.net/kompilator/booklet-pbb>.

4. SUMBER LAINNYA

Hasil Wawancara dengan Bapak Iding, (Bagian Perpajakan), di Kantor Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada tanggal 2 Desember 2013.